

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI  
UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP  
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**



**Nama : Perawati**

**NIM : 222014311**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2019**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI  
UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP  
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Perawati**

**NIM : 222014311**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

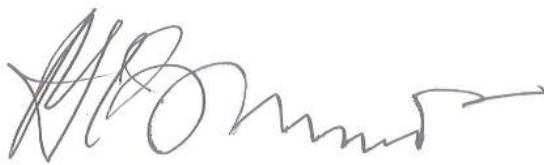
**2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan  
Nama : Perawati  
NIM : 222014311  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal.....  
Pembimbing I,  
Pembimbing II,



H.M. Basyaruddin, R. S.E., Ak., M.Si., C.A  
NIDN/NBM: 0003055605/784024



Nina Sabrina, S.E., M.Si  
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui,  
Dekan  
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



  
Betri Surajudin, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM:0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Perawati  
Nim : 222014311  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Perawati

## **ABSTRAK**

**Perawati/222014311/2019/Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.**

Penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi APBD tahun 2013-2017. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumentasi berupa data laporan realisasi APBD yang di dapat melalui softcopy file, PAD, DAU, DAK, TFDP, Rasio Kemandirian. Hasil penelitian pada PEMKAB Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa: 1) pendapatan asli daerah berpengaruh 17,1% terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. 2) dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. 3) dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

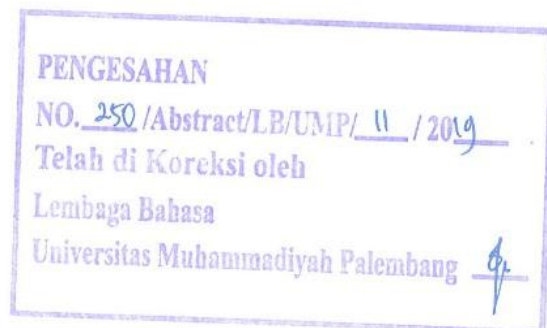
**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tingkat Kemandirian Keuangan**

*Abstract*

*Perawati/222014311/2019/The Effects of Region Own source revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Funds (DAK) on the Level of Regional Government Independence, Districts/City in South Sumatra.*

*This study was to find out the magnitude of the effects of region own source revenue (PAD), general allocation fund (DAU), special allocation funds (DAK) on the level of regional government independence, districts/city in South Sumatra. The data in this study used secondary data in the form of APBD Realization Report data in 2013-2017. The data collection method in this study was documentation analysis in the form of APBD realization report data which could be through file softcopy, PAD, DAU, DAK, TFDP, Independence Ratio. The results of the research at the district/City of PEMKAB in South Sumatra showed that: 1) local revenue had an effect of 17.1% on the level of financial independence of the local government. 2) the general allocation fund did not affect the level of financial independence of the regional government. 3) special allocation funds did not affect the level of financial independence of the regional government.*

*Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Level of Financial Independence.*



## **PRAKATA**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Segala puji bagi Allah SWT. berkat rahmatnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan”. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi.

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu kata kunci untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK. Kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dari pinjaman.. Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh, bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan. Hasil uji secara parsial diperoleh bahwa pendapatan asli daerah positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan. Dan dana alokasi khusus negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda (Kusmiati) dan Alm.ayahanda (Samijo). Selain itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak H.M. Basyaruddin, R, S.E.,Ak., M,Si., C.A dan ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan penulis selama menjalankan studi di fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Palembang dan dalam kesempatan ini penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli,S.E.,M.M selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan,S.E.,M.M selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajudin, S.E., M.,Si.,Ak.,CA dan ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku ketua program dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mella Handayani S.E.,A.k selaku pembimbing akademik.
5. Seluruh staf dosen Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga Allah SWT. membalas budi baik kalian, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam



penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, 2019

Penulis,

Perawati

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRAKARTA .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS</b> .....	
A. Landasan Teori .....	9

1. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	9
2. Pendapatan Daerah .....	10
3. Pendapatan Asli Daerah.....	12
4. Dana Alokasi Umum .....	14
5. Dana Alokasi Khusus .....	16
6. Rasio Keuangan Daerah .....	17
B. Penelitian Sebelumnya .....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Hipotesis.....	33

### **BAB III. METODE PENELITIAN .....**

A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Operasionalisasi.....	35
D. Populasi dan Sampel.....	36
E. Data yang Diperlukan .....	37
F. Metode Pengumpulan Data .....	38
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	39

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**

A. Hasil Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.....	47
2. Visi dan Misi .....	48

3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.....	49
4. Uraian Tugas .....	51
B. Deskripsi Data .....	63
C. Proses Pengujian.....	64
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	64
2. Uji Asumsi Klasik .....	65
a. Uji Normalitas .....	66
b. Uji Multikolinieritas.....	67
c. Uji Heteroskedastisitas.....	69
d. Uji Autokorelasi .....	70
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	71
4. Uji Hipotesis.....	74
a. Koefisien Deteminan ( $R^2$ ) .....	73
b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) .....	74
c. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) .....	76
5. Pembahasan Hasil Penelitian .....	79

**BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....**

A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Otonomi daerah, pemerintah lebih berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak-hak dalam pengelolaan roda pemerintah daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab diantaranya adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijalankannya. Peningkatan kemandirian daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik.

Menurut Abdul (2014: 101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli

daerah, kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan hal utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara dana alokasi umum serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Pendapatan asli daerah itu sendiri merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas pendapatan daerah tersebut dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi ril daerah. Jika struktur pendapatan asli daerah sudah kuat, maka daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Abdul (2014: L-5) Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Kemandirian daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari karena yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kesumber-sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Begitu pula dengan

keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah. Salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah.

Hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah antara lain adalah pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah. Selain pendapatan asli daerah, hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian daerah adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jika dana alokasi umum meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun. Jika dana alokasi khusus meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun, begitu sebaliknya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Reza (2013) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut bertolak belakang



dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasana dan Maria (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2014) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Reza (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan arah negatif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dian dkk (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan dengan pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap realisasi APBD pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel I.1.

**Tabel I.1**  
**Data realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera**  
**Selatan Tahun 2013-2017**

(dalam jutaan rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>	<b>Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>Rasio Kemandirian %</b>
2013	2.021.696	870.516	25.188	3.425.922	63.224	46,11%
2014	2.422.673	985.542	62.754	3.809.213	112.803	48,74%
2015	2.534.526	931.915	69.405	3.425.339	131.570	55,60%
2016	2.546.177	1.071.421	141.702	4.022.114	85.976	42,78%
2017	3.031.633	1.697.897	141.749	4.061.113	131.570	50,26%

Sumber : BPKAD, 2018

Berdasarkan Tabel I.1 dari Tahun 2015 ke tahun 2016 Provinsi Sumatera Selatan memiliki kontribusi pendapatan asli daerah yang meningkat, namun tingkat rasio kemandirian menurun. Kemudian pada tahun 2013 ke tahun 2015 dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 memiliki kontribusi dana alokasi umum yang mengikat, namun tingkat rasio kemandirian juga meningkat. Dan terjadi juga pada tahun yang sama dana alokasi khusus meningkat namun rasio kemandirian juga meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya yang terdapat perbedaan hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapakah besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di sumatera selatan

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

### **1. Pagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berfikir dalam memperluas pengetahuan tentang terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di sumatera selatan.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan evaluasi serta pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahan pustaka dan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Khusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. (edisi 4), Jakarta : Salemba Empat.
- Albert Kurniawan. (2014). *Metode Bisnis Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Anita Lestari. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan*. Vol 1(2): 44-55 e-ISSN:2502-5171. Diakses 5 Desember 2018, dari <http://media.neliti.com/media/publications/210529-pengaruh-dana-alokasi-umum-dau-dan-penda.pdf>
- Budi Santoso. (2015). Keagenan (*Agency*). *Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, Siska P Yudowati. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014. E-Proceeding of Management. Vol 3(3) ISSN: 2355-9357. Diakses 5 Desember 2018, dari <http://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/121487/pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-khusus-terhadap-tingkat-kemandirian-keuangan-daerah-studi-pada-kota-kabupaten-di-provinsi-jawa-barat-tahun-2010-2014-.html>
- Ernawati dan Ikhsan Budi Riharjo. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol 6(2) ISSN: 2460-0585. Diakses 8 Desember 2018, Dari <http://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2831/245>
- I Dewa Gde Bisma Dan Hery Susanto. (2013). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Ganec Swara*. Edisi Khusus. 4(3): 75-86.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisa Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. (edisi 8). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi Dan Maria. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Provinsi Bengkulu. Vol 1(1) ISSN : 2579-969X. Diakses 27 November 2018, dari [jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/715](http://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/715)

Nyoman Trisna Ernawati Dan Leny Suzan. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung e-Procceding Of Management. Vol 2(3). Di Akses 13 November 2018, dari [libraryeprocceding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1700](http://libraryeprocceding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1700)

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Renny Nur'aini, Desfrina, Rooswhan Budi Utomo. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kota di Jawa Barat). *Procceding PESAT (psikologi, ekonomi, sastra, arsitektur, teknik sipil)*. Vol. 5. ISSN : 1858-2559. Diakses 1 November 2018, dari [ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/download/1181/1042](http://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/download/1181/1042)

Reza Mariska. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*. Vol 1(2) ISSN: 1979-738. Diakses 5 November 2018, dari [ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/796/552](http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/796/552).

Septyas Virgi Ardhani. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tax Effort (Upaya Pajak), dan Alokasi Belanja modal di Jawa Timur. Vol 2(3). Di akses 1 Desember 2018, dari [akuntansi/article/view/10346](http://akuntansi/article/view/10346).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Wenpy Banga. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.